

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

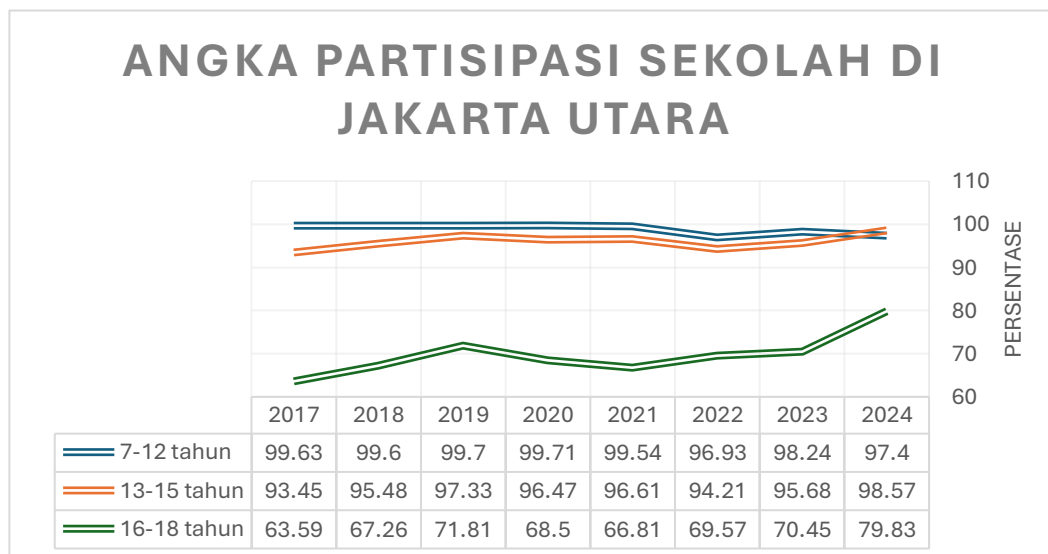
Pendidikan diakui sebagai hak dasar setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah berkewajiban menjamin pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Namun, realita di lapangan menunjukkan masih ada ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk fenomena sekolah “populer” dan “tidak populer”, membuat kompetisi masuk sekolah negeri berlangsung tidak seimbang, sehingga memunculkan praktik diskriminasi dan memperlebar kesenjangan sosial. (Aditomo & Felicia, 2018)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB sebagai dasar pelaksanaan program zonasi. Sistem ini menekankan penerimaan peserta didik berdasarkan jarak domisili ke sekolah. Kebijakan tersebut dirancang untuk memperluas pemerataan kesempatan bersekolah. Zonasi pun diharapkan menjadi instrumen pemerataan akses pendidikan (Rahharjo et al., 2020).

Pada dasarnya, pengelolaan pendidikan berbasis zonasi bertujuan untuk mencapai distribusi yang merata dalam hal pendidikan berkualitas tinggi dan adil. Dalam konteks ini, dapat diidentifikasi dua tujuan utama dari zonasi: (1) meningkatkan kesetaraan dan

keadilan dalam akses terhadap pendidikan; dan (2) meningkatkan konsistensi dalam kualitas layanan pendidikan (Rahharjo et al., 2020).

Implementasi kebijakan ini di tingkat daerah diwujudkan melewati program PPDB berbasis zonasi, termasuk di DKI Jakarta yang diatur melewati Pergub dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tiap tahunnya. Program ini membagi jalur penerimaan menjadi zonasi minimal 50%, afirmasi minimal 15%, perpindahan orang tua maksimal 5%, dan jalur prestasi untuk sisa kuota. Program PPDB zonasi dilaksanakan dalam bentuk daring, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi. program ini dalam bentuk normatif diharapkan mampu menjawab permasalahan klasik pendidikan seperti biaya transportasi yang tinggi, ketimpangan akses, dan favoritism antar sekolah. Program zonasi memberikan efek yang positif terhadap Angka Partisipasi Sekolah, hal ini bisa dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar1.1 Grafik Angka Partisipasi Sekolah di Jakarta Utara dari Tahun 2017 – 2024

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Grafik itu memperlihatkan bahwa semenjak diberlakukan sistem PPDB zonasi terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah di Jakarta Utara. Tabel itu memperlihatkan perbandingan paling pesat tahun 2024 dengan tahun 2017 dimana sistem ini baru pertama kali diterapkan di daerah DKI Jakarta. Pada kisaran umur 16 – 18 tahun, persentase peningkatan angka partisipasi itu mencapai 16,24% diikuti oleh umur 13 – 15 tahun yang angkanya mencapai 5,12%, tetapi mengalami penurunan di umur 7 – 12 tahun senilai 2,23%. Data ini mengindikasikan bahwa zonasi relatif lebih efektif meningkatkan akses pendidikan pada jenjang menengah pertama dan menengah atas, sementara pada jenjang dasar efektivitasnya belum seoptimal jenjang yang lain.

Grafik pada angka partisipasi sekolah di Jakarta Utara memperlihatkan tren peningkatan pada jenjang menengah pertama dan menengah atas, peningkatan partisipasi tidak dan – merta menjamin keberlanjutan pendidikan, hal ini juga dikarenakan masih ada beberapa peserta didik yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Maka dari itu, analisis terhadap data *dropout* menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan dalam keberhasilan program zonasi.

Tabel 1.1 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang di daerah Jakarta Utara Tahun 2024

Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang di daerah Jakarta Utara			
Tahun	SD	SMP	SMA/SMK
2024	88	10	6

Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah siswa putus sekolah di Jakarta Utara pada tahun 2024 menurut jenjang pendidikan. Data memperlihatkan bahwa *dropout* paling tinggi terjadi pada jenjang sekolah dasar (SD) dengan jumlah 88 siswa, diikuti SMP sejumlah 10 siswa, dan SMA/SMK sejumlah 6 siswa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan keberlanjutan pendidikan sudah muncul sejak jenjang dasar, yang berpotensi menghambat capaian pendidikan di tingkat berikutnya. Tingginya angka putus sekolah pada tingkat SD bisa dikarenakan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kondisi sosial – ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan di tingkat lebih lanjut, adapun dari faktor lingkungan sosial yang kurang mendukung. Disisi lain, angka *dropout* yang lebih rendah pada jenjang SMP dan SMA memperlihatkan bahwa kebijakan zonasi relatif berhasil memperluas akses pendidikan pada tingkat menengah, tetapi belum sepenuhnya menyentuh permasalahan dasar di tingkat SD.

Angka putus sekolah dapat menjadi indikator keberlanjutan pendidikan di Jakarta Utara, tetapi persoalan dalam implementasi zonasi lebih banyak ber dari mekanisme sistem yang diterapkan. Sejak awal penerapannya, zonasi kerap memunculkan perdebatan di masyarakat, terutama menyangkut keterbatasan daya tampung sekolah negeri dalam radius spesifik dan mekanisme seleksi yang dinilai belum sepenuhnya adil.

Sebuah penyelidikan terhadap akun media sosial resmi Dinas Pendidikan Jakarta di platform X, @PPDBDKI1, oleh berita online TEMPO, menimbulkan serangkaian pertanyaan, seperti yang diungkapkan oleh pemilik akun @TeszaT7225.

“Saya tidak berhasil menyelesaikan tahap zonasi.” Jarak antara tempat tinggal saya dan lembaga pendidikan yakni 1,4 km. Saya kalah karena usia saya... “Ini hanyalah tahap seleksi berdasarkan usia,” tulisnya. Sesudah kecewa karena kegagalan itu, @secrettddeh juga mengajukan pertanyaan yang sama. Dia mengatakan: “Ini adalah fase zonasi, mengapa usia menjadi prioritas 3...” Sebaiknya beralih ke pembagian fase usia, karena dengan demikian saya tidak akan diklasifikasikan dalam daftar zonasi, tetapi dalam fase usia. (Wuragil, 2024).

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima 1.220 pengaduan dari orang tua pada tahun 2020 mengenai sistem zonasi Jakarta terkait proses penerimaan siswa (PPDB). Menurut Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, anak-anak dari orang tua itu ditolak masuk karena usia mereka yang terlalu muda. Keluhan itu memperlihatkan bahwa enam anak muda mengalami depresi sebagai akibat dari menolak untuk berpartisipasi dalam proses PPDB. Organisasi pendidikan hanya bergantung pada usia untuk memilih siswa, mengabaikan jarak antara rumah siswa dan sekolah. Hal ini bertentangan dengan Pasal 25(1) Peraturan Kementerian Pendidikan, yang mengatakan bahwa usia tidak dipertimbangkan dalam proses seleksi PPDB, tetapi kedekatan rumah calon siswa dengan zona sekolah yang ditunjuk. (Sari, 2021).

Selain itu ada juga dari anggapan lain yang menilai terkait zonasi Kesenjangan kualitas dan pembatasan pilihan adalah anggapan lain yang dievaluasi terkait zonasi pertama. Zonasi bisa menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah di berbagai zona, terutama apabila ada perbedaan dalam daya dan dukungan yang

diberikan oleh pemerintah daerah ataupun komunitas setempat. Zonasi bisa membatasi orang tua dan siswa dalam memilih sekolah yang sesuai dengan kebutuhan ataupun preferensi mereka, terutama apabila sekolah terdekat tidak memenuhi harapan.

Adanya ketidakseimbangan beban dan segregasi sosial, Karena siswa cenderung menghadiri sekolah yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, yang mungkin cenderung homogen dalam bentuk sosial dan ekonomi, zonasi bisa memperkuat segregasi sosial. Karena sekolah-sekolah di daerah spesifik mungkin menghadapi tantangan yang melebihi daripada yang lain, seperti tingkat kemiskinan yang lebih tinggi ataupun jumlah siswa yang melebihi, beban kerja guru dan staf sekolah mungkin tidak seimbang.

Ketiga, Keterbatasan Inovasi: Zonasi sekolah bisa menghalangi inovasi dan kemajuan karena tidak ada persaingan antara sekolah dalam menarik siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal kebijakan zonasi dengan realitas implementasi di lapangan.

Menurut penelitian Andina (2017), empat faktor yang berbeda menghambat penerapan sistem zonasi ini: Kurangnya informasi, meskipun telah disosialisasikan kepada kepala kelurahan, kepala desa, kepala sekolah, dan pemimpin komunitas. Namun, sepertinya pengetahuan ini belum disosialisasikan kepada banyak orang tua. Volume pengguna yang besar yang menggunakan server PPDB telah menyebabkan gangguan, yang mengakibatkan masalah teknis yang berkelanjutan, terutama dalam pemilihan online. Sekolah-sekolah terus menunjukkan ketidakmerataan yang signifikan dalam kualitas.

Keberhasilan program zonasi pada dasarnya tidak sekadar ditetapkan oleh ketentuan regulasi, namun juga dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti, sosial – ekonomi dan lingkungan sosial masyarakat. Dari kemampuan keluarga dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak seperti transportasi, seragam, buku, ataupun fasilitas penunjang menjadi penentu apakah anak bisa terus melanjutkan sekolah. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih baik cenderung lebih mudah beradaptasi dengan aturan zonasi, adapun keluarga dengan keterbatasan ekonomi lebih rentan menghadapi hambatan yang berujung pada rendahnya partisipasi sekolah. Disisi lain, lingkungan sosial juga berperan penting dalam membentuk sikap dan keputusan pendidikan. Dukungan orang tua, dorongan teman sebaya, dan nilai-nilai pendidikan yang berkembang di masyarakat bisa menjadi faktor pendorong bagi anak untuk tetap bersekolah, ataupun sebaliknya menjadi penghambat bila lingkungan kurang menaruh perhatian pada pendidikan. Dengan demikian, implementasi zonasi baru bisa dikatakan berhasil apabila persepsi sosial dan lingkungan sosial turut mendukung, karena keduanya berperan langsung dalam menetapkan akses dan keberlanjutan pendidikan peserta didik.

Memperhatikan berbagai dinamika tersebut, program zonasi yang diatur melalui Pergub DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 belum sepenuhnya menjamin pemerataan akses pendidikan. Keberhasilan implementasinya tidak sekadar ditetapkan oleh aspek regulasi dan teknis, persepsi sosial dan lingkungan sosial masyarakat yang menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan pendidikan. Namun, kajian yang dalam bentuk khusus menyoroti hubungan kedua faktor ini kepada keberhasilan program

zonasi di Jakarta Utara masih terbatas. Maka dari itu, penelitian ini penting dilaksanakan untuk mengisi celah itu sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya penyempurnaan program pendidikan agar lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Penulis menemukan masalah dengan penerapan program zonasi untuk penerimaan siswa baru (PPDB) di sekolah menengah atas (SMA) di Jakarta Utara, berdasarkan informasi latar belakang yang sudah dikemukakan di atas. Masalah-masalah ini termasuk:

- 1 Program zonasi sebagai upaya pemerataan akses pendidikan masih menghadapi tantangan di Jakarta Utara. Salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan persepsi sosial peserta didik, terutama bagaimana mereka memandang kemudahan akses, rasa keadilan, serta pemerataan kesempatan pendidikan dalam pelaksanaan zonasi, yang diduga berhubungan dengan tingkat keberhasilan program zonasi.
- 2 Efektivitas program zonasi bisa dalam bentuk signifikan dipengaruhi oleh lingkungan sosial siswa, yang terdiri dari hubungan keluarga, interaksi dengan teman sebaya, dan pengaruh eksternal. Namun, belum banyak dikaji dalam bentuk komprehensif.

- 3 Efektivitas program zonasi diperkirakan akan dipengaruhi tidak sekadar oleh persepsi sosial namun juga oleh faktor-faktor lingkungan sosial, dalam bentuk bersamaan. Maka dari itu, penelitian ini harus menganalisis korelasi antara kedua faktor itu dalam bentuk bersamaan dalam kerangka efektivitas program zonasi

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan adalah:

1. Apakah ada hubungan antara persepsi sosial (X1) dengan keberhasilan program zonasi (Y)?
2. Apakah ada hubungan antara lingkungan sosial (X2) dengan keberhasilan program zonasi (Y)?
3. Apakah ada hubungan antara persepsi sosial (X1) dan lingkungan sosial (X2) dengan keberhasilan program zonasi (Y)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dengane mpertimbangkan masalah yang disebutkan sebelumnya, adalah:

1. Untuk menganalisis hubungan antara persepsi sosial (X1) dengan keberhasilan program zonasi (Y)
2. Untuk menganalisis hubungan antara lingkungan sosial (X2) dengan keberhasilan program zonasi (Y)

3. Untuk menganalisis hubungan antara persepsi sosial (X1) dan lingkungan sosial (X2) dengan keberhasilan program zonasi (Y)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, Studi ini memperdalam pemahaman mengenai efektivitas kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan untuk mendorong akses yang adil terhadap pendidikan. Studi ini memperdalam analisis hubungan antara unsur-unsur konteks sosial baik persepsi ataupun lingkungan yang memengaruhi efektivitas skema zonasi. Selain itu, studi ini menganalisis respons siswa, khususnya di sekolah menengah atas di Jakarta Utara, terhadap pelaksanaan program itu. Studi ini diharapkan bisa memberikan wawasan baru untuk formulasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan adil, yang didasarkan pada data empiris yang dikumpulkan.
2. Secara Praktis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam meningkatkan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pendidikan, khususnya sistem zonasi PPDB dalam pemerataan akses pendidikan pada daerah Jakarta Utara. Selain itu, penelitian ini juga melatih keterampilan dalam melaksanakan penelitian kuantitatif, seperti pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, sehingga bisa menghasilkan temuan yang berbasis bukti. Pengalaman dalam menyusun

penelitian berbasis data empiris ini juga bisa menjadi bekal akademik bagi penulis pada penelitian lanjutan ataupun dalam dunia profesional.

- b. Bagi Instansi Terkait (Pemerintah, Dinas Pendidikan, dan SMA di Jakarta Utara)

Hasil penelitian ini bisa memberikan data empiris yang akurat bagi instansi terkait dalam mengevaluasi kebijakan zonasi PPDB. Pemerintah dan Dinas Pendidikan bisa memakai temuan ini untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, menyesuaikan sistem zonasi dengan kondisi di lapangan, dan menyusun strategi perbaikan agar lebih adil dan efisien. Bagi sekolah, penelitian ini bisa menjadi acuan dalam memahami persepsi peserta didik terhadap kebijakan zonasi, sehingga sekolah bisa lebih optimal dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi siswa yang diterima melewati sistem zonasi.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai sistem zonasi PPDB dan dampaknya terhadap akses pendidikan, sehingga mereka bisa lebih memahami dan mempersiapkan diri dalam menghadapi sistem ini. Selain itu, penelitian ini bisa membantu masyarakat dalam menilai keadilan dan efektivitas kebijakan zonasi berdasarkan data empiris, bukan hanya berdasarkan asumsi atau pengalaman pribadi. Masyarakat dapat lebih

aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan pendidikan dengan adanya pemahaman yang lebih baik, sehingga sistem zonasi dapat terus diperbaiki agar lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan publik.

1.5 Kerangka Teori/Konsep

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Ketika menyusun penelitian, kajian teori dan penelitian terdahulu menjadi bagian penting yang tidak bisa dilewatkan. Bagian penting ini menjadi tumpuan bagi seorang penulis untuk membantu memahami konsep – konsep dasar yang berkaitan dengan topik yang dibisa penulis. Memahami teori dan hasil penelitian yang sudah dicermati, penulis bisa memahami pengetahuan yang sudah ada, mengidentifikasi celah, dan memperlihatkan orisinalitas penelitian baru.

Pada bagian ini, penulis sudah mencantumkan berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat. Tabel 1.1 adalah tabel penelitian yang sudah penulis kaji dari penelitian yang terdahulu.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lussi R. Loppies, Aisah Asnawi, Teddy Christianto Leasiwal (2022) (mendeley) Pengaruh Kemampuan Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Jiwa Kewirausahaan terhadap Keberhasilan Program Kewirausahaan Mahasiswa di Maluku	Kuantitatif	<u>Variabel Bebas</u> Manajemen Keuangan (X1) Jiwa Kewirausahaan (X2) <u>Variabel Terikat</u> Keberhasilan Usaha (Y)	Menurut analisis regresi, X1 (kemampuan manajemen modal) dan X2 (semangat kewirausahaan) memengaruhi parameter Y, yaitu kinerja proyek bisnis mahasiswa di Maluku. Nilai R ² senilai 0.707 memperlihatkan bahwa dua faktor independen ini bertanggung jawab atas 70,7% variasi dalam efektivitas program kewirausahaan. Faktor-faktor tambahan yang tidak dipertimbangkan pada penelitian ini bertanggung jawab atas 29,3%. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa daya keuangan siswa dan pemikiran kreatif mereka berkorelasi dengan kesuksesan program kewirausahaan mereka. (Loppies et al., 2022).
2	Wilson Rendy Wijaya, Sarwo Edy Handoyo (2023) Pengaruh Media Sosial, Kreativitas, Motivasi Terhadap Keberhasilan Usaha UMKM Kuliner Jakarta Utara	Kuantitatif	<u>Variabel Bebas</u> Media Sosial (X1) Kreativitas (X2) Motivasi (X3) <u>Variabel Terikat</u> Keberhasilan Usaha (Y)	Hasil analisis regresi memperlihatkan bahwa, dengan nilai R ² senilai 0,693, variabel X1 (media sosial), X2 (kreativitas), serta X3 (motivasi) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y (kesuksesan UMKM di sektor kuliner di Jakarta Utara). Ini memperlihatkan bahwa 69,3% variabilitas kesuksesan bisnis dikarenakan oleh ketiga variabel independen itu, adapun 30,7% yang tersisa dipengaruhi oleh komponen lain. Sementara motivasi mempunyai efek positif tetapi tidak signifikan, kreativitas mempunyai efek positif yang signifikan terhadap kesuksesan bisnis. Media sosial, di sisi lain, mempunyai efek negatif tetapi tidak signifikan. (Rendy Wijaya et al., 2023).

3	Kholifatul Khoiria, Raden Bambang Sumarsono, Wildan Zulkarnain (2024) Persepsi Guru dan Orang Tua terhadap Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri di Kota Kediri	Kuantitatif	<u>Variabel Bebas</u> Persepsi (X1) Sistem Zonasi (X2) <u>Variabel Terikat</u> Penerimaan Peserta Didik Baru (Y)	Menurut analisis regresi, variabel Y, yaitu perekrutan siswa baru, di sekolah menengah negeri di Kediri, dipengaruhi dalam bentuk positif serta signifikan oleh faktor X1 (persepsi) serta X2 (sistem zona). Nilai R^2 senilai 0.587 memperlihatkan bahwa kedua variabel itu dalam bentuk dalam bentuk bersama bertanggung jawab atas 58,7% variasi dalam perekrutan siswa baru, adapun 41,3% sisanya berasal dari faktor eksternal yang tidak diteliti pada penelitian ini. (Khoiria et al., n.d.)
4	Agus Bahrudin (2025) Analisis Pengaruh Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan Terhadap Keberhasilan Program Penurunan Stunting di Desa Lanji Kabupaten Kendal	kuantitatif	<u>Variabel Bebas</u> Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan/PMT (X1) <u>Variabel Terikat</u> Keberhasilan Program Penurunan Stunting (Y)	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel X—pelaksanaan program pemberian makanan tambahan (PMT) di Lanji, Kabupaten Kendal—meningkatkan variabel Y—efektivitas program dalam mengurangi stunting. Pada tingkat kepercayaan 5%, ada korelasi yang kuat dengan koefisien korelasi (r) senilai 0.61. Implementasi program pengurangan stunting menerima skor 80% dalam kategori "sangat tinggi", serta keberhasilan program pengurangan stunting menerima skor 73% dalam kategori "tinggi". Ini memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi program PMT melewati komunikasi, daya, perencanaan, serta struktur birokrasi berkorelasi langsung dengan keberhasilan mengurangi stunting di masyarakat. (Agus Bahrudin, 2025)
5	Icha Risma Putri, Nuriah Alfisyahri, Abdul Razak, Irmawati Sagala, Yudi Armansyah, Abdul Malik (2024) Persepsi Masyarakat terhadap Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-	Mixed Method	<u>Variabel Bebas</u> Persepsi Masyarakat (X1) Program BLT-DD (X2)	Analisis memperlihatkan bahwa faktor X_1 (opini publik) serta X_2 (inisiatif BLT-DD) mempunyai pengaruh yang signifikan serta positif terhadap variabel Y (dampak BLT-DD) di Sungai Gambir. Nilai R^2 senilai 0.672 memperlihatkan bahwa kedua variabel itu menjelaskan hampir dua pertiga dari variasi dampak program, dengan

	DD) Tahun 2023 di Desa Sungai Gambir Kabupaten Bungo		<u>Variabel Terikat</u> Dampak BLT-DD (Y)	di bawah angka sepertiga sisanya dikarenakan oleh faktor lain. Hasil ini menekankan pentingnya peningkatan komunikasi serta transparansi untuk memaksimalkan efektivitas BLT-DD. (Putri et al., 2024)
6	Rahmi Fajarwati, Nurmiati Muchlis, Andi Surahman Batara (2023) Pengaruh Faktor Komunikasi, daya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Probolinggo	Kuantitatif	<u>Variabel Bebas</u> Komunikasi (X1) Daya (X2) Sikap Pelaksana (X3) Struktur Birokrasi (X4) <u>Variabel Terikat</u> Output Implementasi Program (Y)	Sebagai hasil dari analisis regresi, variabel X1 (komunikasi), X2 (daya), X3 (sikap pelaksana), serta X4 (struktur birokrasi) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y (hasil dari inisiatif pengembangan pedesaan di Kabupaten Probolinggo). Keempat variabel independen itu bertanggung jawab atas 51,4% variasi dalam pencapaian program, menurut nilai R^2 senilai 0.514. Faktor lain menyumbang 48,6% sisa. Hasil ini memperlihatkan bahwa kualitas komunikasi, ketersediaan daya, dedikasi peserta, serta efisiensi kerangka birokrasi sangat memengaruhi efektivitas implementasi program. (Fajarwati et al., 2023)
7	Hasanuddin & Andiismawaty (2020) Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar tentang Kawasan Tanpa Rokok	Kuantitatif	<u>Variabel Bebas</u> Persepsi Masyarakat (X1) <u>Variabel Terikat</u> Kebijakan Perda (Y)	Menurut analisis regresi, variabel X1 opini publik memiliki dampak yang signifikan serta positif terhadap variabel Y penegakan undang-undang zona bebas asap rokok) pada daerah Polewali Mandar. Hasil R^2 senilai 0,561 memperlihatkan bahwa opini publik bertanggung jawab atas 56,1% perubahan dalam pelaksanaan kebijakan, sementara faktor lain menyumbang 43,9%. Hasil ini memperlihatkan betapa pentingnya penyuluhan serta penegakan hukum bagi keberhasilan teknik ini. (Ismawaty et al., 2020)
8	Hafiz Yuni Andra, Raden Lestari Ganarsih, Deni Setiawan³ Ljupco Kocarev (2023)	Kuantitatif	<u>Variabel Bebas</u>	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Y (kinerja karyawan) dalam bentuk signifikan dipengaruhi oleh

	Pengaruh Kepuasan Kerja, Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai dan Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada BPN Kota Pekanbaru		Kepuasan Kerja (X1) Beban Kerja(X2) <u>Variabel Terikat</u> Kinerja Pegawai(Y)	faktor X1 puasan kerja) serta X2 (beban kerja), yang pada gilirannya memberikan pengaruh Z (kesuksesan program pendaftaran tanah terstruktur/PTSL) di BPN Pekanbaru. Menurut nilai R2 senilai 0.709, variabel-variabel konstruk ini bertanggung jawab atas 70,9% kesuksesan program PTSL, sementara 29,1% tambahan dikarenakan oleh faktor luar yang tidak termasuk dalam cakupan penelitian. Selain itu, kepuasan kerja mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap produktivitas (koefisien 0,442), adapun beban kerja mempunyai dampak negatif yang cukup besar terhadap kinerja (koefisien -0,464). Kinerja juga meningkatkan kesuksesan program PTSL dalam bentuk signifikan. Temuan saat ini memperlihatkan bahwa karyawan bisa menjadi lebih produktif apabila mereka lebih puas dengan pekerjaan mereka serta bisa mengelola beban kerja mereka dengan lebih baik. Ini memperlihatkan bahwa program PTSL berhasil. (Yuni Andra et al., 2023)
9	Indah Pakaya, Johnny H. Posumah, Salmin Dengo (2021) Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pendidikan Masyarakat Di Desa Bontong I Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Kuantitatif	<u>Variabel Bebas</u> Lingkungan Sosial (X1) <u>Variabel Terikat</u> Pendidikan Masyarakat (Y)	Variabel X (lingkungan sosial), yang mencakup keluarga, sekolah, serta masyarakat, dalam bentuk signifikan memberikan pengaruh Y (tingkat pendidikan penduduk) di Desa Bontong I, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pengaruh ini ditunjukkan oleh hasil analisis regresi. 73,9% variabilitas tingkat pendidikan penduduk dikarenakan oleh lingkungan sosial, menurut nilai determinasi (R2) senilai 0,739. Faktor lain menyumbang 26,1% sisa. Menurut persamaan regresi $\hat{Y} = -3,249 + 0,998X$, tingkat pendidikan penduduk akan meningkat senilai 0,998 unit dengan satu unit peningkatan lingkungan sosial. Hasil ini

				memperlihatkan bahwa kondisi sosial yang lebih baik ada hubungannya dengan tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah. (Pakaya et al., 2021a)
10	Acad Sudrajat, Dety Sukmawati, dan Euis Dasipah (2022) Pengaruh Karakteristik Internal dan Eksternal Petani Terhadap Keberhasilan Usaha Bibit Sengon (Paraserienthes falcata) (Suatu Kasus di Kebun Bibit, Jawa Barat)	Kuantitatif	<u>Variabel Bebas</u> Karakteristik Internal Petani (X1) Karakteristik Eksternal Petani (X2) <u>Variabel Terikat</u> Keberhasilan Usaha Bibit Sengon (Y)	Hasil regresi memperlihatkan bahwa variabel X₁ (Karakteristik Internal Petani) serta X₂ (Karakteristik Eksternal Petani) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Y (Keberhasilan Usaha Bibit Sengon) di Kelompok Tani Giri Jaya, Kabupaten Bandung. Nilai koefisien regresi masing-masing senilai 0,175 untuk karakteristik internal serta 0,124 untuk karakteristik eksternal, memperlihatkan bahwa kedua variabel itu mempunyai pengaruh nyata terhadap peningkatan produksi bibit sengon. Karakteristik internal yang dominan memiliki pengaruh adalah umur produktif serta pengalaman bertani, adapun karakteristik eksternal yang paling memiliki pengaruh adalah kegiatan pendampingan serta penyuluhan. Dengan demikian, semakin baik faktor internal serta eksternal petani, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan usaha pembibitan sengon. (Sudrajat et al., 2022)

Sumber : Diolah Peneliti

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi merupakan proses mengoordinasikan sumber daya manusia dan non – manusia untuk memastikan pelaksanaan tugas – tugas spesifik secara efektif dalam suatu organisasi. Istilah “publik” sering dipahami sebagai konsep tunggal tanpa adanya istilah alternatif untuk menggantikannya. Ilmu sosial memandang publik sebagai kumpulan individu yang saling terhubung melalui rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut tidak selalu sama karena dapat berubah sesuai situasi dan konteks yang dihadapi.

Administrasi Publik bisa diartikan sebagai suatu proses pengelolaan serta pengorganisasian sumber daya, baik manusia ataupun non-manusia, yang dilaksanakan oleh institusi negara ataupun lembaga publik, untuk menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, serta pembangunan, dalam rangka menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah sesuai konteks sosialnya. Selain itu, ada beberapa ahli yang menambahkan pengertian administrasi publik diantaranya:

1. Menurut Dimock (1992), administrasi publik mempunyai jangkauan yang lebih luas dan adalah komponen esensial dari administrasi umum. Memahami struktur, manajemen, dan operasional bahkan institusi terkecil—dari keluarga hingga organisasi global—adalah fokus utama administrasi publik. Karena administrasi publik adalah komponen fundamental ilmu politik, hal ini mempunyai dampak signifikan terhadap politik negara. Maka dari itu, terdapat

dua prasyarat untuk pendidikan administrasi publik. Pengetahuan mengenai administrasi umum adalah prasyarat utama. Prasyarat kedua adalah kesadaran bahwa politik seringkali menjadi akar masalah dalam administrasi publik. Menurut Dimock, bidang studi administrasi publik meneliti bagaimana harapan masyarakat terhadap pemerintah bisa dipenuhi. Akibatnya, disiplin administrasi publik mencakup baik operasional pemerintah ataupun cara-cara pelaksanaannya.

2. Pada tahun 1997, Thoha mengatakan bahwa kerangka kerja politik dan prinsip-prinsip administrasi membentuk administrasi publik. Maka dari itu, ranah administrasi publik mencakup semua operasi administrasi yang dilaksanakan di dalam lingkup politik, aparatur negara, ataupun kerangka kerja pemerintahan.
3. Menurut Robbins (1983), juga menyampaikan bahwa *administration in the universal proces of vilocioncy getting activities completed with and through other people* (Administrasi juga mencakup semua proses pencapaian tujuan dalam bentuk efektif melewati orang lain).
4. Menurut Siagian (1994), Dalam administrasi publik, ini mengacu pada proses lengkap dari upaya yang dilaksanakan oleh dua ataupun lebih orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Administrasi publik dalam ilmu administrasi mengacu pada pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan melewati undang-undang dan mekanisme hukum lainnya. Pengelolaan negara dilaksanakan dalam bentuk publik,

dan hukum publik berfungsi untuk kepentingan umum. Istilah "publik" berkaitan dengan status negara (Rodiyah, 2021).

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik, juga dikenal sebagai pemerintahan, adalah bidang ilmu sosial yang mencakup tiga cabang pemerintahan (legislatif, yudikatif, dan eksekutif), dan masalah sosial seperti kebijakan publik, administrasi publik, pengembangan administrasi, tujuan pemerintahan, dan etika yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. (Tua Mulia Raja Panjaitan et al., 2021)

Thomas Samuel Khun (18 Juli 1922 – 17 Juni 1996) berpandangan bahwa teori-teori muncul dari pandangan dan alat ukur yang tersedia pada waktu spesifik; namun, gagasan bahwa teori bersifat relatif tidaklah salah. Suatu pandangan baru bisa dikatakan paradigma apabila sudah dianut oleh suatu komunitas akademis ataupun ilmiah. Adapun administrasi Publik yang dilihat dari perspektif paradigma sudah mengalami perkembangan dari klasik hingga kontemporer.

Abad ke 21 lahir paradigma kontemporer demi menyesuaikan diri agar tetap sesuai dengan tuntutan. Kebutuhan Masyarakat saat ini. Adapun beberapa gagasan yang lahir sejak tahun 1970-an yaitu:

1. Paradigma *New Public Administration* (Administrasi Publik Baru)

PaParadigma *New Public Administration Paradigma* memperhatikan paradigma administrasi publik saat ini, yang terlalu menekankan indikator ekonomi. Paradigma ini menganggap konsep “*social equity*”, yang dinilai

sebagai pilar ketiga bersama dengan dua pilar lainnya, sebagai komponen penting dalam menilai kinerja administrasi publik selain nilai ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Untuk menjaga komitmen terhadap “*social equity*”, karyawan administrasi publik harus bertindak sebagai "administrator proaktif" daripada sekadar birokrat yang netral dalam bentuk politik. Administrasi Publik Baru berfokus pada memungkinkan lembaga publik mewujudkan tujuan kemanusiaan dalam bentuk optimal dengan membangun struktur yang desentralisasi, demokratis, responsif, dan partisipatif, dan memastikan bahwa layanan publik disediakan dalam bentuk adil. Frederickson menantang gagasan bahwa personel dan teori administrasi publik harus netral karena administrasi publik berkomitmen untuk mempromosikan keadilan sosial dan idealisme kemanusiaan (Asni & Andika, 2018).

2. Paradigma *New Public Management* (Manajemen Publik Baru)

New Public Management (NPM) adalah konsep baru dalam administrasi publik/pemerintahan yang menerapkan praktik-praktik dari sektor swasta ke sektor publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan lokal dan membangun *welfare society* (kesejahteraan Masyarakat). esis utama dari konsep ini adalah bahwa sektor publik harus berorientasi pasar untuk memastikan efisiensi biaya yang tinggi bagi pemerintah (Heriyanto, 2014). Konsep NPM adalah menggambarkan pergeseran dari model klasik ataupun tradisional administrasi publik (Old Public Administration) ke sistem administrasi publik kontemporer yang

didasarkan pada mekanisme pasar dan di mana aktor utamanya adalah sektor swasta dan masyarakat.

3. Paradigma *New Public Service* (Pelayanan Publik Baru)

Menurut *New Public Service*, birokrasi merupakan masyarakat dan harus mematuhi semua ekspresi logis, normatif, dan konstitusional dari masyarakat. Pemimpin birokrasi adalah orang-orang dengan dimensi sosial dan politik yang menjalankan peran sebagai penyedia layanan publik. Konsep "*The New Public Service (NPS)*" menawarkan peningkatan signifikan dalam kondisi birokrasi pemerintah untuk mengoptimalkan layanan publik demokratis. Dalam kerangka ini, semua peserta terlibat dalam bentuk aktif, dan tidak ada yang berfungsi semata-mata sebagai penonton (Nurlaela & Andriani, 2018).

4. *Good Governance* (GG)

Administrasi publik, kata "*Governance*" mengacu pada proses pengembangan dan pelaksanaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan publik. Proses ini dilaksanakan oleh berbagai pihak: sejumlah organisasi yang terhubung satu sama lain melewati hubungan vertikal dan horizontal yang lebih fleksibel dan dipandu oleh nilai-nilai publik seperti legitimasi, daya tanggap, dan kreativitas. Tujuan tata kelola pemerintahan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melewati penggunaan prosedur administratif yang efektif. Undang-undang dan peraturan bukan satu – satunya

dasar tata kelola yang efektif; administrasi publik yang efektif melampaui fungsi pemerintahan (Ameilia, 2023).

1.5.4 Kebijakan Publik

Suatu kenegaraan dibutuhkan kebijakan demi mencapai keteraturan dalam bermasyarakat, karena itulah kebijakan menjadi instrumen bagi pemerintah untuk mengarahkan, mengatur, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Kebijakan didefinisikan dalam KBBI sebagai kumpulan konsep dan prinsip yang membentuk struktur dan landasan dasar untuk kepemimpinan, tugas, dan metodologi yang berkaitan dengan pemerintahan dan organisasi (Ramadhana, 2023).

Menurut Federick (Agustino, 2008: 7) Sebuah kebijakan adalah serangkaian tindakan ataupun rencana yang dibisa oleh individu, kelompok, ataupun pemerintah dalam situasi spesifik yang menawarkan peluang dan hambatan dengan tujuan utama untuk mencapai tujuan spesifik (Sawir, 2021).

Kata “*public*” dalam kebijakan publik dipahami dalam kaitannya dengan istilah “*private*”. Dalam sejarah Romawi Gobett (2007) membedakan *private* sebagai hal yang berkaitan dengan individu, adapun publik merujuk pada komunitas ataupun negara. Istilah *public* juga diartikan sebagai sesuatu yang bersifat bukan pribadi, mencakup kepentingan orang banyak dan berkaitan dengan negara, bangsa, ataupun masyarakat yang berafiliasi dengan pemerintahan.

Keputusan ataupun tindakan yang dibisa untuk menyelesaikan masalah spesifik ataupun mencapai tujuan spesifik disebut kebijakan. Apabila kebijakan itu tidak sekadar berlaku bagi individu ataupun kelompok kecil, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas dan ditetapkan oleh pemerintah, maka kebijakan itu disebut kebijakan publik. Thomas R. Dye secara sederhana mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” (pilihan tindakan apa pun yang dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan publik mempunyai sifat hierarkis, mulai dari tingkat nasional, regional, hingga lokal) (Alhasni et al., 2024).

Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan pada penelitian (Iriawan, 2024) kebijakan publik adalah usaha yang melibatkan tujuan, nilai, dan praktik spesifik. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan sekadar keputusan spontan, tetapi program yang dirancang dengan cermat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Program-program ini juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun pemerintah, dan praktik-praktik yang diterapkan dalam pelaksanaannya

Sebagaimana dipaparkan oleh para ahli, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan ataupun tindakan yang dibisa oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan masalah sosial spesifik. Kebijakan ini tidak disusun dalam bentuk spontan, tetapi dirancang dalam bentuk sistematis dengan mempertimbangkan tujuan, nilai – nilai, dan praktik – praktik yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, kebijakan

publik bisa diterapkan pada berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari nasional, regional, hingga lokal, sesuai dengan kebutuhan dan konteks permasalahan yang ada..

Pengembangan suatu kebijakan memerlukan proses formulasi, yang adalah proses yang kompleks dan melibatkan penilaian terhadap berbagai proses dan variabel. Maka dari itu, para ilmuwan politik yang terlibat dalam analisis kebijakan publik mengklasifikasikan proses formulasi kebijakan publik menjadi fase – fase

yang terpisah (Alhasni et al., 2024). Ripley (1985) dalam (Muadi et al., 2016) menjelaskan beberapa langkah dalam kebijakan publik, yaitu:

- 1. Agenda setting*
- 2. Formulation dan legitimization*
- 3. Program Implementations*
- 4. Evaluation of implementation, performance, and impacts*
- 5. Decisions about the future of the policy and program*

Pemangku kepentingan dari kedua sektor pemerintah (*official policy-makers*) serta non-pemerintah (*nongovernmental participants*) harus terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang disebut Anderson dalam Abdul Wahab (2005) sebagai pembuat kebijakan resmi serta kontributor non-pemerintah. (Muadi et al., 2016)

Adapun aktor yang terlibat terdiri dari pemerintah, yang mencakup lembaga legislatif, yudikatif, serta eksekutif. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang diterapkan. Kelompok kepentingan turut memberikan penilaian sesuai dengan tujuan spesifik, sementara media berperan penting dalam membentuk opini publik serta memengaruhi proses pengambilan

keputusan. Pihak swasta menjadi aktor strategis, terutama dalam sektor perekonomian serta industri. Tak kalah penting, akademisi serta peneliti berkontribusi melewati penyediaan data serta analisis berbasis penelitian yang mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif serta berbasis bukti.

Implementasi kebijakan publik adalah tahap di mana kebijakan yang sudah dirumuskan diterapkan dalam praktik. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada faktor-faktor seperti koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, serta dukungan dari aktor terkait, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak berdampak pada masyarakat. Relevansi kebijakan publik dengan topik program zonasi PPDB sangat penting pada konteks penelitian ini, karena implementasi program zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) memerlukan pengawasan yang baik serta penerimaan dari masyarakat agar kebijakan itu bisa berjalan dengan adil serta efektif. Evaluasi yang tepat terhadap implementasi kebijakan ini akan membantu melihat apakah tujuan kebijakan itu tercapai, yakni terciptanya pemerataan akses pendidikan serta mengurangi kesenjangan sosial di tingkat daerah. Demi tercapai tujuan dari kebijakan itu sendiri, diperlukan respons Masyarakat sebagai bahan evaluasi dari kebijakan itu sendiri.

1.5.5 Persepsi Sosial

Status memperlihatkan bagaimana individu diposisikan dalam masyarakat serta kelompoknya. Status memperlihatkan peringkat individu dalam suatu kelompok sosial

dibandingkan dengan orang lain. Status juga mengacu di posisi individu dalam hierarki, bersama dengan hak serta tanggung jawab yang terkait, serta jumlah posisi ideal yang didudukinya. Dua dimensi status adalah struktural serta fungsional. Dimensi struktural berkaitan dengan melihat perbandingan tingkat status di antara berbagai status, adapun dimensi fungsional berkaitan dengan status khusus individu.

Sebaliknya, status sosial individu memperlihatkan seberapa baik mereka dipandang di masyarakat. Status sosial didefinisikan sebagai status apa pun yang menggambarkan hubungan antar individu. Status sosial juga mengacu di posisi individu dalam lingkungannya, reputasi yang mereka peroleh, serta hak serta tanggung jawab yang terkait. Status sosial individu tidak terbatas pada kelompok sosial mereka sendiri; itu bahkan bisa berdampak pada status sosial individu dalam kelompok sosial lainnya.

Soekanto mendefinisikan status sosial – ekonomi merupakan posisi individu dalam suatu kelompok sosial, yang ditetapkan oleh jenis kegiatan ekonomi, tingkat pendidikan, dan pendapatan Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kondisi sosial – ekonomi berkaitan dengan keadaan sosial yang diatur dalam bentuk sosial ataupun status sosial yang menempatkan individu di posisi spesifik dalam hierarki sosial. Peran ini melibatkan berbagai hak istimewa dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh individu sesuai dengan statusnya(Koentjaraningrat, 1981).

Kedudukan ini memperlihatkan posisi individu dalam struktur sosial yang disertai hak dan kewajiban sosial spesifik. Dalam bentuk umum, status sosial-ekonomi mengacu pada kemampuan individu ataupun keluarga untuk membayar kebutuhan

sehari-hari mereka melewati penghasilan mereka, yang pada gilirannya memengaruhi peran dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Penghasilan ataupun pekerjaan spesifik juga bisa menetapkan status individu (Atika et al., 2018).

Dengan kata lain, perbedaan kedudukan dan kondisi sosial dapat memunculkan perbedaan cara pandang terhadap fenomena yang sama. Maka, status dan kondisi sosial–ekonomi tidak hanya berkaitan dengan akses atau kemampuan individu, tetapi juga dapat membentuk bagaimana individu memandang suatu kebijakan apakah kebijakan tersebut dianggap adil, membantu, atau justru menimbulkan hambatan.

1.5.6 Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah keseluruhan kondisi, suasana, dan hubungan antar individu ataupun kelompok manusia yang saling memengaruhi pada kehidupan bermasyarakat. Menurut Sumaatmadja (1988), Lingkungan sosial terdiri dari sekelompok orang yang berinteraksi dan berdampak satu sama lain. Sejalan dengan hal itu, Purwanto (2009) mendefinisikan lingkungan sosial mencakup semua individu yang bisa dalam bentuk langsung ataupun tidak langsung memberikan pengaruh individu. Disisi lain, Setiadi dan Kolip (2011) menekankan bahwa "lingkungan sosial" adalah istilah yang mengacu pada lingkungan ataupun situasi di mana sekelompok orang mengidentifikasi diri, seperti keluarga, sekolah, pekerjaan, ataupun komunitas.

Menurut Dewantara (2010), ada tiga kategori utama lingkungan sosial: lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Selain itu,

media massa, baik cetakataupun elektronik, juga termasuk bagian dari lingkungan sosial karena memiliki pengaruh terhadap pola pikir, nilai, dan perilaku individu meskipun tidak melibatkan interaksi langsung (Pakaya et al., 2021a). Selain itu, Berns (2010) menambahkan bahwa media massa baik cetak, elektronik, maupun digital juga adalah bagian dari lingkungan sosial karena memiliki pengaruh terhadap pembentukan nilai, pola pikir, dan perilaku meskipun tidak melewati interaksi langsung(Wustqa, 2014).

Dengan demikian, lingkungan sosial bisa dipahami sebagai keseluruhan unsur sosial yang terdiri atas hubungan antar individu, kelompok, dan lembaga sosial baik melewati interaksi langsungataupun tidak langsung yang membentuk sikap, perilaku, dan pola adaptasi individu pada kehidupan bermasyarakat. Lingkungan sosial berperan penting dalam memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi, sehingga kualitas interaksi dalam keluarga, sekolah, masyarakat,ataupun media sosial menjadi faktor utama dalam perkembangan sosial individu.

1.5.7 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 15 Tahun 2024 mengatur dalam bentuk rinci mengenai pelaksanaan PPDB, khususnya melewati jalur zonasi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (20), Pembagian zona didasarkan pada siswa baru (CPDB) yang tinggal pada daerah spesifik, dengan mempertimbangkan distribusi sekolah, tempat tinggal CPDB, dan kapasitas penerimaan sekolah sesuai dengan jumlah anak usia sekolah

pada daerah itu. Pasal 10 ayat (1) menetapkan bahwa daftar zona prioritas ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan. Kriteria pembagian zona didasarkan pada alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu keluarga (KK) yang diterbitkan setidaknya satu tahun sebelum pendaftaran. Apabila terjadi perubahan data dalam asuransi kesehatan tanpa perubahan tempat tinggal, asuransi kesehatan tetap berlaku selama bisa dibuktikan dengan dokumen seperti kartu asuransi kesehatan lama ataupun laporan kehilangan dari kepolisian.

Selain itu, Pasal 40 Ayat (1) huruf c mewajibkan bahwa kuota zonasi di tingkat sekolah menengah atas ditetapkan senilai setengah dari kapasitas penerimaan. Menurut tempat tinggal CPDB, Pasal 43 Ayat (1) membagi area menjadi tiga tingkat prioritas. Zona prioritas utama mencakup CPDB yang tinggal di RT yang sama ataupun di dekat sekolah; zona prioritas kedua mencakup area di sekitar sekolah, seperti yang tercantum pada peta; dan zona prioritas ketiga mencakup CPDB yang tinggal di kelurahan yang sama ataupun di dekat sekolah. Zona prioritas, usia, urutan preferensi sekolah, dan waktu pendaftaran akan menetapkan seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kuota. Tujuan dari kebijakan ini yakni untuk memastikan bahwa warga Jakarta mempunyai akses yang adil dan merata terhadap pendidikan (DKI Jakarta, 2024).

1.5.8 Indikator Keberhasilan Program Zonasi

Indikator keberhasilan program merupakan kriteria ataupun tolok ukur yang diterapkan untuk mengevaluasi keberhasilan ataupun kegagalan suatu program.

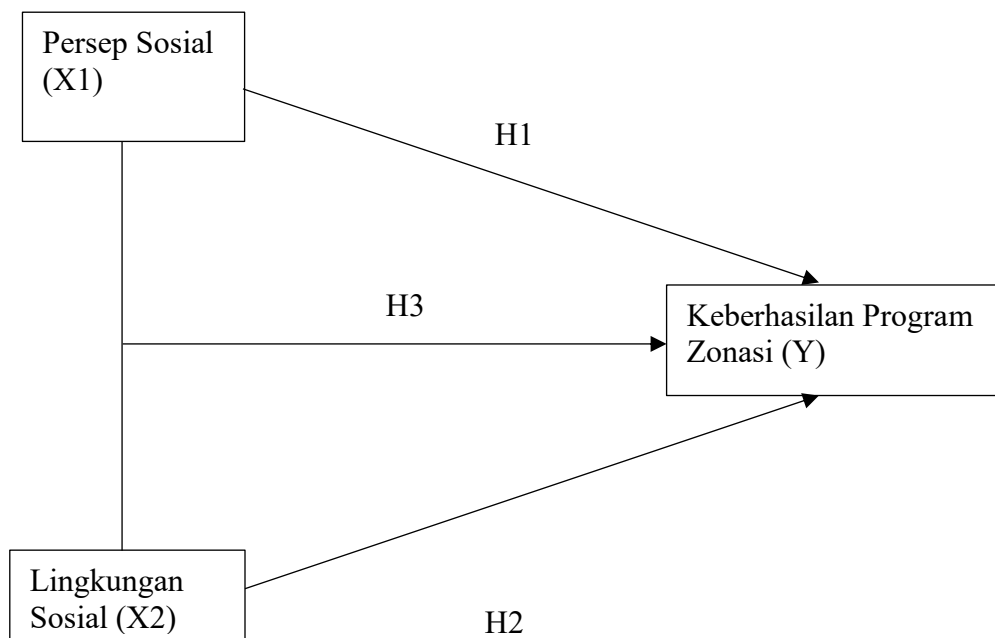
Menurut Listya (2010), indikator keberhasilan program termasuk kesesuaian infrastruktur dengan rencana yang ditetapkan, keselarasan elemen yang terlibat, pembuatan rekomendasi kebijakan, dan penerapan sistem pemantauan untuk memantau kemajuan di masa depan (Ratnasari & Manaf, 2015). Keberhasilan suatu program membutuhkan dukungan dari semua pihak yang terlibat agar nantinya bisa mencapai konsensus bersama, karena semua program memiliki tujuan untuk kesejahteraan semua masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk (Goo, 2019).

Indikator keberhasilan sangat penting untuk menetapkan seberapa jauh program pendidikan mencapai tujuannya. Tidak sekadar hasil akhir yang harus diterapkan untuk mengevaluasi keberhasilan; efek jangka panjang, strategi, dan manajemen juga harus dipertimbangkan. Karena kompleksitas sistem pendidikan, yang mencakup elemen seperti kebijakan, kurikulum, pedagogi, keterlibatan siswa, dan partisipasi komunitas, masih sulit untuk menemukan indikator yang tepat. Ini masih menjadi masalah besar (Iqbal, Marpaung, Maulida, Oktaviani, & Widyana, 2024, hlm. 39). Kualitas pembelajaran, pencapaian kompetensi siswa, dan dampak sosial dan ekonomi program adalah indikator keberhasilan dalam implementasi praktis (Ahmad, Gunawan, Suryana, Suherni, dan Mulyani, 2023). Karena mereka membantu pendidik, administrator, dan pemangku kepentingan, indikator keberhasilan sangat penting (Zahroh & Hilmiyati, 2024).

Program zonasi dibuat dengan dua tujuan utama: meningkatkan kesetaraan dan kesetaraan dalam akses ke pendidikan dan mendorong kesetaraan kualitas pendidikan

di semua lembaga. Keberhasilan program ini tidak semata-mata dilihat dari mekanisme penerimaan peserta didik baru, tetapi dari sejauh mana kebijakan zonasi mampu membuka akses pendidikan yang adil bagi semua lapisan masyarakat dan menekan kesenjangan kualitas antar sekolah. Dengan demikian, zonasi tidak sekadar berfungsi sebagai aturan teknis seleksi, namun juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan (Yulianti & Astuti, 2025).

1.5.9 Kerangka Teori



Sumber : Diolah Peneliti

Penjelasan :

Persepsi Sosial (X1) : “Variabel Independen (bebas)”

Lingkungan Sosial (X2) : “Variabel Independen (bebas)”

Keberhasilan Program Zonasi (Y) : “Variabel Dependen (terikat)”

1.6 Pengembangan Hipotesis

Asumsi yang didasarkan pada bukti atau perluasan hipotesis yang sudah dikonfirmasi sebelumnya disebut hipotesis, dan ketika diterapkan pada informasi baru, ini disebut hipotesis (Fadilla et al., 2022). Hipotesis diterapkan untuk menghubungkan data penelitian ini. Hal ini memungkinkan mereka untuk menunjukkan hubungan yang disarankan dan menjelaskan mengapa hal itu terjadi (Suriasumantri, 2016). Hipotesis pada penelitian ini terdiri atas :

- **H1:**

Adanya hubungan yang signifikan antara persepsi sosial (X1) dengan Program Zonasi (Y)

- **H2:**

Adanya hubungan yang signifikan antara lingkungan sosial (X2) dengan Program Zonasi (Y)

- **H3:**

Adanya hubungan yang signifikan antara persepsi sosial (X1) dan lingkungan sosial (X2) dengan Program Zonasi (Y)

1.7 Definisi Konsep – Operasional

1.7.1 Persepsi Sosial (X1)

Soekanto mendefinisikan status sosial – ekonomi merupakan posisi individu dalam suatu kelompok sosial, yang ditetapkan oleh jenis kegiatan ekonomi, tingkat pendidikan, dan pendapatan (Soekanto, 2017). Melalui konsep status sosial–ekonomi, dapat dipahami bahwa perbedaan kondisi tersebut berpotensi memengaruhi cara individu menilai dan merespons suatu kebijakan, sehingga berkaitan dengan pembentukan persepsi sosial. Dalam konteks penelitian ini, status sosial–ekonomi tidak digunakan untuk memberi label tinggi atau rendah, tetapi untuk membantu menjelaskan variasi pengalaman dan pandangan peserta didik terhadap pelaksanaan zonasi, terutama dalam melihat sejauh mana kebijakan tersebut dianggap memberi akses dan kesempatan pendidikan secara adil. Dengan demikian, konsep ini menggambarkan keberagaman kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara seimbang dan objektif, sekaligus menjadi pijakan untuk memahami perbedaan persepsi sosial yang muncul di antara responden. Dalam penelitian ini, variabel persepsi sosial dinilai melewati tiga indikator utama, yaitu :

Tabel 1.3 Tabel Indikator Penelitian Variabel Persepsi Sosial (X1)

Indikator	Sub Indikator
Tingkat Pendidikan	“Saya merasa dengan adanya sistem zonasi bisa memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang lebih tinggi.” (Soekanto, 2017)

Pendapatan	“Saya merasa sistem zonasi membantu siswa seperti saya untuk bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya besar”. (Soekanto, 2017)
	“Sekolah negeri membantu saya belajar tanpa perlu memikirkan biaya yang berat.” (Soekanto, 2017)
Jenis Pekerjaan	Pekerjaan orang tua saya membuat mereka mendukung saya bersekolah di wilayah yang mudah dijangkau dari rumah”. (Soekanto, 2017)

Sumber Data : Diolah oleh Peneliti

Ketiga indikator tersebut dianggap mampu merepresentasikan persepsi sosial responden secara komprehensif. Tingkat pendidikan berkaitan dengan sejauh mana individu memperoleh pengetahuan formal yang membentuk cara memahami informasi, menafsirkan kebijakan, dan mengambil sikap. Pendapatan berhubungan dengan persepsi individu terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan hidup serta tingkat keterjangkauan suatu layanan, sehingga dapat memengaruhi cara mereka menilai kemudahan atau hambatan yang dirasakan. Sementara itu, jenis pekerjaan berkaitan dengan pengalaman sosial dalam lingkungan kerja yang dapat membentuk pola interaksi, cara pandang, dan sensitivitas terhadap aturan atau perubahan kebijakan. Ketiga indikator ini, jika dipahami secara bersama, membantu menggambarkan latar yang membentuk cara responden memandang dan menilai pelaksanaan program, sehingga menjelaskan variasi persepsi sosial yang muncul di antara responden.

1.7.2 Lingkungan Sosial (X2)

Menurut Dewantara (2010), ada tiga kategori utama lingkungan sosial: lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Selain itu, media massa, baik cetak ataupun elektronik, juga termasuk bagian dari lingkungan sosial karena memiliki pengaruh terhadap pola pikir, nilai, dan perilaku individu meskipun tidak melibatkan interaksi langsung (Pakaya et al., 2021). Selain itu, Berns (2010) menambahkan bahwa media massa baik cetak, elektronik, ataupun digital juga adalah bagian dari lingkungan sosial karena memiliki pengaruh terhadap pembentukan nilai, pola pikir, dan perilaku meskipun tidak melewati interaksi langsung. (Wustqa, 2014).

Dengan demikian, lingkungan sosial bisa dipahami sebagai keseluruhan unsur sosial yang mencakup hubungan antarindividu, kelompok, dan lembaga sosial baik melewati interaksi langsung ataupun tidak langsung yang membentuk sikap, perilaku, dan cara adaptasi individu pada kehidupan masyarakat. Lingkungan sosial mempunyai peran penting dalam membentuk cara berpikir, berinteraksi, dan menanamkan nilai-nilai sosial yang menjadi dasar partisipasi individu pada kehidupan bersama. Pada penelitian ini, variabel lingkungan sosial dinilai melewati tiga indikator utama, yaitu:

Tabel 1.4 Tabel Indikator Penelitian Variabel Lingkungan Sosial (X2)

Indikator	Sub Indikator
Teman Sebaya	Dengan adanya sistem zonasi suasana belajar lebih menyenangkan karena teman-teman berasal dari lingkungan yang sama. (Pakaya et al., 2021a)

	Dengan adanya sistem zonasi saya lebih cepat beradaptasi karena banyak teman yang sudah saya kenal di sekolah sekarang. (Pakaya et al., 2021a)
Masyarakat	Saya merasa lebih mudah berpartisipasi dalam kegiatan sekolah karena lokasinya yang dekat dengan rumah dan saya mengenal banyak orang tua lain. (Pakaya et al., 2021a)
	Masyarakat di sekitar rumah saya mendukung anak-anak untuk bersekolah di sekolah terdekat. (Pakaya et al., 2021a)
Media	Informasi di media membantu keluarga saya memahami cara kerja sistem penerimaan sekolah. (Pakaya et al., 2021a); (Wustqa, 2014)

Sumber Data : Diolah oleh Peneliti

Ketiga indikator itu menggambarkan bentuk interaksi sosial yang memiliki pengaruh terhadap pembentukan perilaku dan pola adaptasi individu. Teman sebaya menjadi faktor yang memengaruhi sikap dan perilaku individu melewati proses pergaulan dan interaksi sehari-hari. Lingkungan masyarakat berperan dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab, solidaritas, dan kepedulian sosial. Disisi lain, media baik cetak, elektronik, ataupun digital — berperan dalam membentuk cara pandang dan sikap individu terhadap berbagai aspek kehidupan social melewati informasi dan representasi nilai-nilai yang disampaikan. Keempat indikator ini dalam bentuk dalam bentuk bersama mencerminkan kondisi sosial yang memengaruhi perilaku dan pandangan individu dalam konteks kehidupan bermasyarakat ataupun pendidikan

1.7.3 keberhasilan program Zonasi (Y)

Indikator keberhasilan program diterapkan untuk mengevaluasi seberapa efektif ataupun tidak efektif suatu program. Menurut Listya (2010), tanda-tanda keberhasilan suatu program adalah infrastruktur yang sesuai dengan rencana yang ditetapkan, keselarasan elemen yang terlibat, dokumentasi saran kebijakan, dan pembentukan sistem pemantauan kemajuan (Ratnasari & Manaf, 2015). Keberhasilan suatu program membutuhkan dukungan dari semua pihak yang terlibat agar nantinya bisa mencapai konsensus bersama, karena semua program memiliki tujuan untuk kesejahteraan semua masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk (Goo, 2019).

Indikator keberhasilan sangat penting untuk menetapkan seberapa jauh program pendidikan mencapai tujuannya. Tidak sekadar hasil akhir yang harus diterapkan untuk mengevaluasi keberhasilan; efek jangka panjang, strategi, dan manajemen juga harus dipertimbangkan. Karena kompleksitas sistem pendidikan, yang mencakup elemen seperti kebijakan, kurikulum, pedagogi, keterlibatan siswa, dan partisipasi komunitas, masih sulit untuk menemukan indikator yang tepat. Ini masih menjadi masalah besar (Iqbal, Marpaung, Maulida, Oktaviani, & Widyana, 2024, hlm. 39). Kualitas pembelajaran, pencapaian kompetensi siswa, dan dampak sosial dan ekonomi program adalah indikator keberhasilan dalam implementasi praktis (Ahmad, Gunawan, Suryana, Suherni, dan Mulyani, 2023). Indikator keberhasilan sangat penting dikarenakan perannya yang membantu pendidik, administrator, dan pemangku kepentingan (Zahroh & Hilmiyati, 2024).

Program zonasi pendidikan dirancang sebagai kebijakan strategis untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di semua daerah. Tujuan utamanya adalah memastikan tiap peserta didik memperoleh kesempatan yang adil untuk bersekolah di lembaga pendidikan yang terdekat dari tempat tinggal, sekaligus mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah. Keberhasilan program zonasi tidak sekadar dinilai dari pelaksanaan teknis penerimaan peserta didik, tetapi dari sejauh mana kebijakan itu mampu menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Pada penelitian ini, variabel keberhasilan program zonasi dinilai melewati dua indikator utama, yaitu:

Tabel 1.5 Tabel Indikator Penelitian Variabel Keberhasilan Program Zonasi (Y)

Indikator	Sub Indikator
pemerataan kualitas layanan pendidikan.	“Fasilitas di sekolah saya sudah cukup lengkap untuk kegiatan belajar.” (Rahharjo et al., 2020)
pemerataan dan keadilan dalam mengakses pendidikan	“Menurut saya Penerimaan sekolah sekarang terasa lebih adil karena mempertimbangkan jarak rumah.” (Rahharjo et al., 2020)
	“Proses pendaftaran sekolah kini lebih mudah diakses oleh semua kalangan.” (Rahharjo et al., 2020)
	“Dengan adanya sistem zonasi sekolah negeri kini diisi oleh siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi.” (Rahharjo et al., 2020)

Sumber Data : Diolah oleh Peneliti

Pemerataan dan keadilan akses pendidikan mencerminkan sejauh mana sistem zonasi memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik dari berbagai latar belakang sosial untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa hambatan jarak

ataupun status ekonomi. Disisi lain, pemerataan kualitas layanan pendidikan menilai kesetaraan mutu antar sekolah, meliputi aspek tenaga pendidik, fasilitas, dan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik (Setiawan et al., 2019). Kedua indikator ini dalam bentuk bersama menggambarkan efektivitas kebijakan zonasi dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan pada daerah DKI Jakarta khususnya daerah Jakarta Utara yang menjadi fokus penelitian.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Teknik kuantitatif yang diusulkan oleh Sugiyono (2009:14), penelitian ini menyelidiki hubungan antara persepsi sosial dan lingkungan sosial dengan efektivitas program zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jakarta No 15/2024. Sugiyono mengatakan bahwa penelitian kuantitatif diterapkan untuk mempelajari populasi ataupun sampel spesifik. Untuk memvalidasi gagasan, sampel dipilih dalam bentuk acak, data dikumpulkan dengan alat ilmiah, dan analisis data dilaksanakan dalam bentuk kuantitatif ataupun statistik. (Fadilla et al., 2022).

1.8.2 Populasi dan Sampel

1.8.2.1 Populasi

Cooper dan Emory (1997) mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan informasi dari mana kesimpulan spesifik bisa dibuat (Fadilla et al., 2022). Semua orang dalam suatu kelompok orang, hewan, peristiwa, ataupun benda yang dalam

bentuk sistematis tinggal di tempat yang sudah ditetapkan disebut populasi. Hasil akhir suatu penelitian didasarkan pada populasi ini sebagai dasar untuk kesimpulan yang dibuat dari penelitian itu. Populasi tidak sekadar terdiri dari jumlah subjek yang diteliti, namun juga mencakup semua karakteristik ataupun sifat dari subjek itu (Amin et al., 2023). Populasi dari penelitian ini adalah siswa yang pernah mendaftar sekolah di lingkungan Jakarta Utara melewati jalur zonasi baik yang diterima maupun ditolak sehingga populasi secara pasti belum diketahui.

1.8.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari populasi keseluruhan yang dipilih berdasarkan ukuran dan karakteristik populasi tersebut. Ferdinand (2014) mendefinisikan sampel sebagai subkelompok dari populasi yang mencakup beberapa elemen dari populasi tersebut. Penelitian ini, metode Lemeshow digunakan untuk menentukan ukuran sampel karena ukuran populasi target diketahui, tetapi karakteristik distribusinya tetap tidak pasti (Slovin, 1960). Metodologi ini dianggap sesuai karena kesederhanaannya, efisiensinya, dan penggunaannya yang luas dalam penelitian sosial dan kebijakan publik terkait persepsi publik. Rumus untuk menghitung ukuran sampel menurut Lemeshow adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 \times P (1 - P)}{d^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel minimal

Z = Skor Z (1.96 untuk tingkat kepercayaan 95%)

P = Proporsi populasi (0.5 untuk variansi maksimal)

Q = 1 - P

d = Margin of error (10% atau 0.1)

Sesuai dengan rumus di atas, Perhitungan sampel menggunakan pendekatan Lemeshow dengan estimasi maksimal 50% serta tingkat eror 10% sebagai berikut :

$$\begin{aligned}n &= \frac{Z^2 \times P \times Q}{d^2} \\n &= \frac{(1,96)^2 \times 0,5 \times 0,5}{(0,1)^2} \\n &= \frac{3,841 \times 0,5 \times 0,5}{0,01} \\n &= \frac{3,841 \times 0,25}{0,01} \\n &= \frac{0,9604}{0,01} \\n &= 96,04 = 97\end{aligned}$$

Jadi, ukuran sampel yang diperlukan berdasarkan rumus Lemeshow adalah sekitar 97 responden.

1.8.3 Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini, metode *Probability Sampling* diterapkan; yang paling menonjol merupakan *simple Random Sampling*, metode yang memungkinkan sampel dibisa dalam bentuk acak tanpa mempertimbangkan strata demografis yang berbeda

(Sugiyono dalam Hidayat, 2018). Teknik ini memberikan peluang yang sama bagi tiap individu untuk terpilih, sehingga hasilnya lebih representatif dan bebas dari bias (Ghofur, 2019). Metode ini dipilih karena efektif untuk populasi besar dan keterbatasan sumber daya peneliti. Pengambilan sampel dilaksanakan dalam bentuk objektif melewati undian ataupun aplikasi acak. Adapun kriteria sampel adalah peserta didik ataupun masyarakat yang pernah mendaftarkan anak mereka di lingkungan Jakarta Utara melewati jalur zonasi.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

1.8.4.1 Jenis Data

Jenis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka yang diolah melewati teknik analisis statistik. Data kuantitatif dipilih agar bisa menggambarkan dalam bentuk jelas hubungan antara hubungan antara persepsi sosial dan lingkungan sosial kepada keberhasilan program zonasi. Melewati pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian lebih akurat, sistematis, dan mudah untuk diinterpretasikan.

1.8.4.2 Sumber Data

Data primer dan sekunder diterapkan pada penelitian ini. Data primer berasal dari hasil penyebaran kuesioner kepada peserta didik yang merasakan sistem zonasi khususnya lingkungan Jakarta Utara untuk mengetahui persepsi mereka terhadap implementasi program zonasi PPDB. Disisi lain, data sekunder dibisa dari dokumen resmi dari laman PPDB, berupa daftar nama peserta yang diterima

di sekolah daerah Jakarta Utara melewati jalur zonasi. Data ini diterapkan untuk memberikan gambaran tambahan terkait pola pendaftaran peserta didik dalam konteks penerapan kebijakan zonasi.

1.8.5 Skala Pengukuran

Pada penelitian ini, sikap dan perspektif peserta dicatat melewati skala Likert. Skala ini memungkinkan responden mengekspresikan jawaban mereka sesuai dengan seberapa setuju mereka dengan pernyataan yang diberikan. Tingkat respons untuk kontinum ini adalah yaitu:

- Sangat Setuju (SS) —————→ 5
- Setuju (S) —————→ 4
- Netral (N) —————→ 3
- Tidak Setuju (Ts) —————→ 2
- Sangat Tidak Setuju (STS) —————→ 1

Menggunakan skala ini data kualitatif dari respon masyarakat ataupun peserta didik dapat diubah menjadi data kuantitatif yang siap untuk dianalisis.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang paling sesuai untuk penelitian ini melewati kuesioner yang akan dibagikan kepada sampel yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kuesioner merupakan cara perolehan informasi yang mana peserta diserahkan sejumlah soal atau ungkapan berbentuk tulisan supaya direspon. Ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variabel dan ekspektasi yang akan dinilai (Sugiyono,

2019). Kuesioner didistribusikan dalam bentuk tidak langsung (*daring*) kepada individu yang memenuhi kriteria pengambilan sampel.

1.8.7 Teknik Analisis

Analitis bisa diterapkan pada penelitian kuantitatif sebagai analisis statistik deskriptif untuk menampilkan data dan sebagai studi inferensial untuk melihat hubungan ataupun perbedaan di antara variabel. Penelitian ini memakai teknik analisis data yang difasilitasi oleh program SPSS untuk melihat korelasi di antara variabel dalam bentuk lebih rinci.

1.8.7.1 Uji Validitas & Reabilitas

Uji validitas adalah prosedur yang digunakan untuk menetapkan dan memverifikasi ketepatan dan keandalan alat ukur agar bisa digunakan untuk mengukur apa yang ingin dinilai. (1) Prioritas tertinggi: Mempertahankan makna dalam bentuk utuh, memastikan keakuratan tata bahasa, dan mempertahankan ataupun meningkatkan kelancaran bahasa. Jangan mengubah konten yang dikutip – tanda kutip dan materi yang dikutip harus dipertahankan persis seperti dalam teks aslinya. (2) Prioritas kedua: Gunakan bahasa yang formal, tepat, dan objektif yang sesuai untuk penulisan akademis. Hindari ungkapan bahasa sehari-hari, redundansi, pengulangan, istilah yang tidak jelas, dan pernyataan pribadi. Patuhi konvensi tipografi. (Sugiyono, dalam Dewi & Sudaryanto, 2020) Kuesioner bisa dinilai valid apabila tiap pertanyaan dalam kuesioner itu berfungsi untuk mengidentifikasi dan menetapkan sesuatu yang akan dinilai dengan kuesioner itu.

Selain itu, kuesioner bisa dinilai valid apabila nilai yang dibisa melebihi nilai tabel. Pertanyaan bisa dinilai valid apabila nilai validitas tiap tanggapan yang dibisa sesudah pengiriman ataupun distribusi kuesioner melebihi 0,3 (Rosita et al., 2021).

Rumus Uji Validitas :

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan :

***r* : Koefisien Validitas**

***X* : Skor Item**

***Y* : Skor Total**

Uji realibilitas, alat penelitian melibatkan evaluasi keandalan kuesioner yang diterapkan untuk pengumpulan data (Dewi & Sudaryanto, 2020). Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilaksanakan dengan memakai uji Cronbach's alpha. Dengan memakai uji *Cronbach alpha* penelitian ini mengevaluasi relibiitas. Variabel yang mempunyai nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,60 dinilai bisa diandalkan ataupun konsisten. (Utami & Dwi Susanti, 2022).

Rumus Uji Realibilitas

$$\alpha = \frac{K}{K - 1} \left[1 - \frac{\sum s_i^2}{\sum s_t^2} \right]$$

Keterangan

***K* : Jumlah Item**

X : Variansi tiap Itema

Y : Variansi Total

1.8.7.2 Uji Hipotesis

Menurut Arifin (2017:17), hipotesis diuji untuk memverifikasi validitas suatu pernyataan dalam bentuk statistik dan menetapkan apakah pernyataan itu diterima ataupun ditolak. Uji hipotesis memiliki tujuan untuk membantu pengambilan keputusan terkait hipotesis yang sudah dirumuskan. Sugiyono (2017:95) mendefinisikan hipotesis sebagai tanggapan sementara terhadap topik penelitian, yang ditandai dengan sifatnya yang sementara, karena bergantung sepenuhnya pada teori-teori yang relevan dan belum diverifikasi oleh data empiris dari pengumpulan data. Prosedur uji hipotesis diawali dengan penetapan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a), dilanjutkan dengan pemilihan uji statistik yang sesuai dan perhitungan, penerapan tingkat signifikansi, serta penetapan persyaratan uji (Hutapea et al., 2024).

1.8.7.2.1 Uji Korelasi rank Kendall

Kedua variabel harus dinilai setidaknya pada skala ordinal agar objek yang diteliti bisa diorganisasikan dalam dua baris berturut-turut. Salah satu metrik korelasi dengan persyaratan ini adalah koefisien korelasi *rank Kendall*. Data awal terlebih dahulu diubah menjadi data peringkat apabila data itu adalah data interval Siegel (1994: 250).

Analisis korelasi *rank Kendall* diterapkan untuk menyelidiki hubungan antara dua ataupun lebih variabel apabila data bersifat ordinal

ataupun terurut. (Sugiono, 2004: 117) Keuntungan pendekatan ini adalah bisa diperluas lebih lanjut untuk mendapatkan koefisien korelasi parsial dan bisa diterapkan pada sampel dengan lebih dari sepuluh nilai.

Uji nonparametrik yang disebut korelasi Kendall diterapkan untuk mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel. Jumlah pasangan dalam dua sampel, a dan b, masing-masing berukuran n, diberikan oleh $n(n - 1)/2$ (Khotimah, 2007). Rumus berikut diterapkan untuk menghitung nilai korelasi peringkat Kendall :

$$r = \frac{n_c - n_d}{\frac{1}{2}n(n - 1)}$$

Keterangan

Nc = jumlah yang sesuai

Nd = jumlah yang tidak sesuai

1.8.7.3 Korelasi Berganda

Analisis korelasi berganda diterapkan untuk menilai kekuatan hubungan antara dua variabel independen dan satu variabel dependen dalam bentuk bersamaan. Sugiyono (2015:191) mengatakan bahwa rumus berikut bisa diterapkan untuk menghitung korelasi berganda:

$$R_{y.x1.x2} = \sqrt{\frac{r^2_{yx1} + r^2_{yx2} - 2r_{yx1} r_{yx2} r_{x1x2}}{1 - r_{x1x2}}}$$

Keterangan :

Ryx1x2 = Korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y.

ryx1= korelasi product moment antara X1 dengan Y

ryx2 = korelasi product moment antara X2 dengan Y

rx1x2 = korelasi product moment antara X1 dengan X2

1.8.7.4 Koefisien Determinasi

Arfin (2017) mengatakan bahwa analisis korelasi melihat bagaimana dua variabel kuantitatif berinteraksi satu sama lain. Korelasi merupakan yang efektif untuk mengukur intensitas hubungan antara variabel pada skala kontinu dari 0 hingga 1. Penelitian Arifin (2017) menemukan bahwa koefisien korelasi positif maksimum yakni 1, koefisien korelasi negatif minimum yakni -1, dan nilai korelasi terendah adalah 0. Nilai korelasi satu ataupun satu memperlihatkan hubungan sempurna antara dua ataupun lebih variabel. Koefisien determinasi (KD) dihitung dengan rumus khusus yang menghitung hubungan antara variabel dependen dan independent yaitu :

$$\mathbf{KD = r^2 \times 100\%}$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

r² = Kuadrat Koefisien Korelasi

Kriteria untuk koefisien determinasi adalah :

- a. Jika nilai Kd adalah nol (0), pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen minimal.

- b. Jika nilai K_d adalah satu (1), pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen signifikan.